

ABSTRAK

Pembangunan nasional yang meliputi pembangunan sektor perumahan, industri, transportasi, perdagangan dan lain-lain mempunyai kedudukan penting dalam aktivitas pembangunan nasional di Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari urgensi keberadaan ruang yang berkaitan dengan para pelaku kegiatan bisnis dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang seperti yang terjadi di Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto merupakan bagian dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN), posisi ini menjadikan Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu wilayah prioritas dalam percepatan pembangunan ekonomi guna menunjang perekonomian nasional. Dalam kegiatan menunjang perekonomian nasional yang berupa pembangunan industri terdapat konflik dalam pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan izin. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan penerapan dari Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 dalam pelaksanaan pengendalian penggunaan lahan dan menganalisis penegakan hukum mengenai konflik dalam pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peraturan.

Metode penelitian dilakukan secara yuridis empiris dengan melakukan pendekatan sosiologis hukum dan pendekatan kasus yang selanjutnya akan dianalisis bersifat kualitatif.

Implementasi pengendalian penggunaan lahan tata ruang di wilayah Kabupaten Mojokerto dilakukan secara optimal oleh Dinas PUPR melalui Pasal 67 Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 dilakukan pemetaan zonasi wilayah strategis, pengelolaan perizinan, serta sosialisasi pada masyarakat terkait kebijakan penataan ruang. Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran dilakukan melalui sanksi administratif yang berupa peringatan tertulis dan pembongkaran pembangunan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 92 ayat 2 dan 8 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032.

Kata kunci: pembangunan-pemanfaatan lahan-penegakan hukum

ABSTRACT

National development which includes the development of the housing sector, industry, transportation, trade and others has an important position in national development activities in Indonesia. This is inseparable from the urgency of the existence of space related to business activities in the use and utilization of space as happened in Mojokerto Regency. Mojokerto Regency is part of the National Strategic Area (KSN), this position makes Mojokerto Regency one of the priority areas in accelerating economic development to support the national economy. In supporting the national economy in the form of industrial development, there are conflicts in land use that are not in accordance with permit provisions. Therefore, this study was conducted to explain the application of Regional Regulation Number 9 of 2012 concerning the Regional Spatial Plan of Mojokerto Regency Year 2012-2032 in the implementation of land use control.

The research method is carried out in an empirical juridical manner by taking a sociological approach to law and a case approach which will then be analyzed qualitatively.

The implementation of spatial land use control in the Mojokerto Regency area is carried out optimally by the PUPR Office through Article 67 of Mojokerto Regency Regional Regulation Number 9 of 2012 concerning the 2012-2032 Mojokerto Regency Regional Spatial Plan carried out strategic area zoning mapping, permit management, and socialization to the community related to spatial planning policies. Law enforcement against violators is carried out through administrative sanctions in the form of written warnings and demolition of development as stipulated in Article 92 paragraphs 2 and 8 of Regional Regulation Number 9 of 2012 concerning the Regional Spatial Plan of Mojokerto Regency for 2012-2032.

Keywords: *development-land use-law enforcement*